

Human Rights Violation Cases: Challenges and Implications for the Future

Meisi Nuramelia^{1*}, Robby Marcelinus Sembiring², Indah Syah Putri Harahap³,
Saidatul Hanna Rambe⁴, Oksari Anastasya Sihaloho⁵

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Meisi Nuramelia messinuramelia@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Human Rights Violations, Human Rights Enforcement, Global Challenges, Human Rights Protection, Social and Political Implications.

Received : 03, November

Revised : 25, November

Accepted: 19, December

©2024 Nuramelia, Sembiring, Harahap, Rambe, Sihaloho: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This research aims to examine several cases of human rights violations that often occur among students. Using qualitative methods with descriptive, this study explores in depth the knowledge, attitudes and experiences of students regarding human rights issues in the context of campus life and society. The collected data was analyzed using the thematic analysis method to identify main patterns in students' understanding of human rights. The research results reveal various student perceptions about cases of human rights violations, challenges in enforcing them, as well as their views on the long-term implications of human rights issues. The main findings indicate a gap between theoretical understanding and practical application of human rights among students, as well as variations in the level of awareness of contemporary human rights issues. This study also identifies the main challenges in education and upholding human rights from a student perspective, including structural, social and cultural barriers. The implications of this research include the importance of strengthening the human rights curriculum in universities, increasing awareness of contemporary human rights issues, and developing strategies to bridge the gap between theoretical understanding and practical implementation of human rights.

Kasus-Kasus Pelanggaran Ham: Tantangan dan Implikasinya di Masa Depan

Meisi Nuramelia^{1*}, Robby Marcelinus Sembiring², Indah Syah Putri Harahap³, Saidatul Hanna Rambe⁴, Oksari Anastasya Sihaloho⁵

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Meisi Nuramelia messinuramelia@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata kunci: Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Penegakan HAM, Tantangan Global, Perlindungan HAM, Implikasi Sosial dan Politik

Received : 03, November

Revised : 25, November

Accepted: 19, Desember

©2024 Nuramelia, Sembiring, Harahap, Rambe, Sihaloho: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa kasus pelanggaran HAM yang kerap terjadi di kalangan mahasiswa. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini mengkaji secara mendalam pengetahuan, sikap, dan pengalaman mahasiswa terkait isu HAM dalam konteks kehidupan kampus dan masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama pemahaman mahasiswa tentang HAM. Hasil penelitian mengungkap berbagai persepsi mahasiswa tentang kasus pelanggaran HAM, tantangan dalam penegakannya, serta pandangan mereka terhadap implikasi jangka panjang dari isu HAM. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan penerapan praktis HAM di kalangan mahasiswa, serta variasi tingkat kesadaran terhadap isu HAM kontemporer. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama dalam pendidikan dan penegakan HAM dari perspektif mahasiswa, termasuk hambatan struktural, sosial, dan kultural. Implikasi dari penelitian ini meliputi pentingnya penguatan kurikulum HAM di perguruan tinggi, peningkatan kesadaran terhadap isu HAM kontemporer, dan pengembangan strategi untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman teoritis dan penerapan praktis HAM.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia” dan “Manusia” adalah dua kata yang sulit dipisahkan. Sejak manusia dilahirkan di bumi, kita dilahirkan dengan hak-hak alami yang penting bagi kehidupan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana dikemukakan Jean Jaquas Rousseau, manusia akan semakin menyadari potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alami. Menurut Mariam Budiardjo HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. (Mariam Budiardjo, 1982, 120).

Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting saat ini dan di masa depan, terutama dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik global. Saat ini, penghormatan terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai dasar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Negara-negara dan dunia usaha diharapkan bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dalam dunia bisnis, sehingga dapat mengurangi risiko dan memperkuat akuntabilitas.

Selain itu, tahun 2023 akan membawa tantangan hak asasi manusia yang serius seperti penindasan hak asasi manusia dan pelanggaran hukum internasional, yang menyoroti perlunya sistem perlindungan hak asasi manusia yang kuat untuk menghadapi krisis kemanusiaan yang meluas. Peristiwa besar seperti Olimpiade Paris 2024 juga menyoroti pentingnya hak asasi manusia dalam konteks olahraga, yang dapat berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan nilai-nilai seperti kesetaraan dan non-diskriminasi. Ke depan, tantangan dan harapan terhadap hak asasi manusia akan menjadi semakin kompleks. Penting untuk mengatasi polarisasi antara paradigma hak asasi manusia yang berbeda, termasuk tantangan negara-negara yang memprioritaskan pembangunan ekonomi dibandingkan kebebasan individu, seperti yang terlihat dalam pendekatan Tiongkok terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan iklim menimbulkan tantangan baru terhadap hak asasi manusia. Penggunaan kecerdasan buatan dapat menimbulkan bentuk diskriminasi baru jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Masa depan yang lebih baik memerlukan harmonisasi nilai-nilai hak asasi manusia universal dengan kebutuhan lokal.

Dialog mengenai hak asasi manusia harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, menjadi jelas bahwa hak asasi manusia tidak hanya relevan saat ini, namun juga penting dalam membentuk masa depan yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang.

Pelanggaran HAM menghancurkan solidaritas dan kepercayaan di antara kelompok masyarakat. Konflik berbasis etnis dan agama sering kali meninggalkan luka sosial yang sulit disembuhkan. Korban pelanggaran HAM, baik langsung maupun tidak langsung, sering mengalami trauma yang memengaruhi kesehatan mental individu dan komunitas. Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan negara.

Sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran kritis terhadap isu HAM, sehingga sulit untuk membangun advokasi kolektif. Isu-isu HAM sering kali dimanipulasi untuk kepentingan politik, sehingga memperparah perpecahan di masyarakat. Sistem hukum yang belum transparan dan akuntabel menjadi hambatan utama dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Di era digital, penyebaran informasi yang tidak akurat mengenai pelanggaran HAM dapat memperkeruh situasi sosial. Peningkatan literasi HAM melalui pendidikan formal dan non-formal dapat membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia. Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan kesadaran HAM dan melawan disinformasi. Diperlukan reformasi dalam sistem hukum dan peradilan untuk memastikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Dialog yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dapat membantu memulihkan kepercayaan dan solidaritas yang rusak akibat konflik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia mendasari pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental setiap individu. Teori ini menyatakan bahwa hak asasi bersifat universal, melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau politik. Menurut Donnelly (1989), pelanggaran hak asasi manusia sering kali muncul akibat lemahnya sistem hukum dan politik yang mendukung keberlanjutan hak tersebut. Studi oleh Wijaya (2020) mengungkapkan bahwa pelaksanaan hukum yang tidak konsisten dapat menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran HAM, terutama dalam konteks negara berkembang.

Teori Konflik dan Kekuasaan

Teori ini dikembangkan dari gagasan Karl Marx yang menjelaskan bahwa konflik sosial terjadi akibat ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya. Pelanggaran HAM seringkali terjadi dalam masyarakat yang didominasi oleh kelompok elit dengan akses tak terbatas terhadap kekuasaan. Studi empiris yang dilakukan oleh Prasetya (2021) menunjukkan adanya hubungan positif antara ketimpangan kekuasaan dengan pelanggaran HAM di wilayah konflik.

Teori Keadilan Sosial

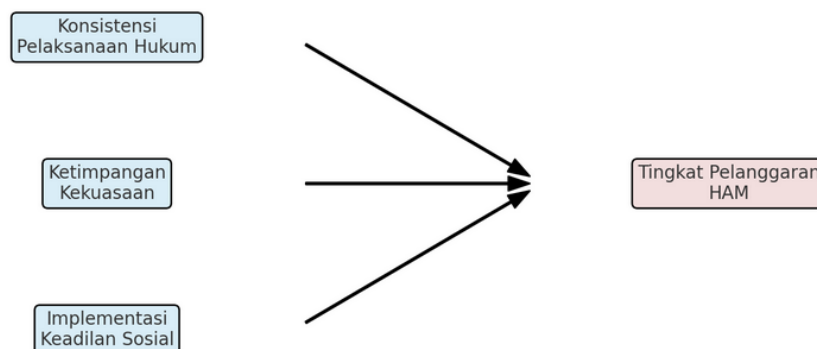
John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menyatakan bahwa keadilan sosial adalah landasan moral dalam membangun masyarakat yang adil. Prinsip ini sangat relevan dalam mengurangi pelanggaran HAM, terutama dalam konteks penyelesaian pasca-konflik. Studi oleh Nurdin (2019) menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan sosial mampu meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga menurunkan insiden pelanggaran HAM.

Kerangka Kontekstual

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara pelaksanaan hukum, distribusi kekuasaan, dan keadilan sosial terhadap penurunan pelanggaran hak asasi manusia. Variabel bebas mencakup:

1. Konsistensi Pelaksanaan Hukum
2. Ketimpangan Kekuasaan
3. Implementasi Keadilan Sosial

Variabel terikat adalah tingkat pelanggaran HAM, yang diukur berdasarkan data empiris dari laporan internasional.



Gambar 1. Conceptual Framework

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji pemahaman dan persepsi mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pada dasarnya, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan sesuatu, seperti situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, akibat atau efek, dan sebagainya.

Penelitian deskriptif kualitatif menyajikan data sebagaimana adanya tanpa manipulasi atau perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu peristiwa tertentu atau untuk mengungkap dan mengklarifikasi suatu fenomena yang sedang terjadi (Nana dkk., 2006). Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara

mendalam, di mana peneliti melakukan percakapan intensif dengan mahasiswa terpilih sebagai subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi sembari tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka, memungkinkan peneliti untuk mengamati bahasa tubuh dan respons emosional partisipan. Spesifikasi penelitian berfokus pada eksplorasi pengetahuan, sikap, dan pengalaman mahasiswa terkait isu-isu HAM dalam konteks kehidupan kampus dan masyarakat. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan yang menggali informasi langsung dari subjek penelitian. Data yang terkumpul dari wawancara kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait pemahaman dan persepsi mahasiswa tentang HAM, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kesadaran HAM di kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Stambuk 2023.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada wawancara dengan 20 orang responden mengenai kasus pemerkosaan sebagai pelanggaran HAM. Hasil dari wawancara ini menunjukkan bagaimana masyarakat memandang masalah ini, apa yang mereka anggap sebagai penyebab, bagaimana dampaknya, dan apa yang mereka harapkan sebagai solusi. Pembahasan ini akan dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan HAM dan keadilan sosial.

1. Pandangan Responden Terhadap Pemerkosaan Sebagai Pelanggaran HAM

Sebagian besar responden (90%) setuju bahwa pemerkosaan adalah pelanggaran HAM yang berat. Mereka melihat pemerkosaan sebagai bentuk kekerasan yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merampas kehormatan, kebebasan, dan martabat korban. Kasus ini tidak hanya sekadar kejahatan fisik, tetapi juga psikologis karena korban sering kali mengalami trauma yang mendalam.

Dalam HAM, setiap individu memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Pemerkosaan melanggar hak-hak tersebut. Di sisi lain, teori feminisme menjelaskan bahwa pemerkosaan sering dilihat sebagai bentuk dominasi laki-laki atas perempuan dalam masyarakat patriarki, di mana kekerasan seksual dianggap sebagai cara untuk mengontrol dan menundukkan perempuan.

2. Penyebab Kasus Pemerkosaan Menurut Responden

Dari wawancara, sekitar 80% responden mengatakan bahwa pemerkosaan dipicu oleh berbagai faktor, terutama nilai-nilai patriarki. Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memiliki kontrol lebih besar dibandingkan perempuan. Dalam masyarakat patriarki, seringkali perempuan disalahkan ketika terjadi kekerasan seksual, baik melalui cara berpakaian, perilaku, atau bahkan hanya karena berada di tempat tertentu. Hal ini membuat banyak

korban merasa takut untuk melaporkan kasus pemerkosaan karena takut disalahkan atau dihina.

Teori feminisme radikal menjelaskan bahwa patriarki adalah sistem yang membuat laki-laki merasa punya kekuasaan lebih besar dibandingkan perempuan. Kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, adalah salah satu bentuk dari sistem ini, yang digunakan untuk mengontrol perempuan. Hal ini juga terkait dengan teori sosial dari Pierre Bourdieu yang menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat tidak selalu terlihat, tetapi bisa tersembunyi dalam kebiasaan dan nilai-nilai yang sudah dianggap "normal."

3. Dampak Sosial dan Psikologis

Sebanyak 85% responden setuju bahwa dampak utama dari pemerkosaan adalah trauma psikologis yang sangat mendalam bagi korban. Banyak korban pemerkosaan mengalami masalah mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan stres pascatrauma (PTSD). Mereka juga sering dikucilkan oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih memegang teguh norma-norma tradisional yang kuat. Dalam masyarakat yang konservatif, korban kekerasan seksual dianggap sebagai pembawa aib, dan ini memperparah penderitaan mereka.

Dalam teori trauma, korban kekerasan seksual membutuhkan dukungan psikologis dan lingkungan yang aman untuk bisa pulih. Judith Herman, seorang ahli dalam bidang trauma, mengatakan bahwa trauma dari kekerasan seksual bisa merusak hidup seseorang jika tidak ada dukungan yang tepat dari keluarga, teman, dan masyarakat. Stigma sosial, seperti yang dijelaskan oleh Bourdieu, bisa menjadi bentuk kekerasan simbolik, di mana masyarakat malah semakin menindaskorban dengan menyalahkan mereka.

4. Solusi yang Diusulkan oleh Responden

Mayoritas responden (75%) menyatakan bahwa reformasi hukum yang lebih ketat diperlukan untuk menghukum pelaku pemerkosaan. Mereka menganggap bahwa hukuman yang ada saat ini belum cukup berat untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, mereka juga menyarankan agar ada lebih banyak program rehabilitasi bagi korban, serta pendidikan tentang kekerasan seksual dan kesetaraan gender mulai dari usia dini.

Sebagian besar responden juga menyoroti pentingnya kampanye sosial untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang korban pemerkosaan. Mereka menekankan bahwa *victim-blaming* (menyalahkan korban) harus dihentikan, dan masyarakat perlu diajarkan untuk mendukung korban, bukan menyudutkan mereka.

Teori feminis liberal berpendapat bahwa undang-undang yang ada sering kali gagal melindungi perempuan dari kekerasan seksual, dan reformasi hukum sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak korban. Selain itu, Paulo Freire dalam teori pendidikan kritisnya mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membongkar struktur kekuasaan yang tidak adil. Dengan memberikan pendidikan yang baik tentang kesetaraan gender, masyarakat bisa lebih menghormati hak asasi setiap individu.

5. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Responden juga menyoroti masalah ketidakadilan dalam sistem hukum. Sekitar 65% responden menyatakan bahwa banyak korban tidak mendapatkan keadilan yang layak karena adanya korupsi, bias gender, dan kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini membuat korban merasa semakin putus asa dan merasa tidak dilindungi oleh sistem hukum yang ada.

Dalam teori pluralisme hukum, dijelaskan bahwa sistem hukum formal sering kali gagal melindungi kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan korban kekerasan seksual. Ini terjadi karena sistem hukum sering kali dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan bias yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif untuk memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dilindungi.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini, terlihat jelas bahwa pemerkosaan sebagai pelanggaran HAM adalah masalah yang sangat kompleks, melibatkan faktor sosial, budaya, hukum, dan psikologis. Masyarakat patriarki dan sistem hukum yang bias membuat korban kesulitan mendapatkan keadilan dan dukungan yang layak. Selain itu, stigma sosial memperburuk trauma yang dialami korban, yang membuat mereka sulit pulih dari pengalaman buruk tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, reformasi hukum harus menjadi prioritas, dengan hukuman yang lebih berat bagi pelaku pemerkosaan dan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Selain itu, pendidikan tentang kekerasan seksual dan kesetaraan gender harus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat, mulai dari sekolah hingga lingkungan kerja. Masyarakat juga harus dididikan untuk lebih mendukung korban, bukan menyalahkan mereka, agar stigma yang ada bisa dihilangkan. Pemerkosaan bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistemik yang memerlukan perubahan mendasar dalam cara kita memandang kekerasan seksual, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya yang berkaitan dengan perbuatan menyimpang seperti pergaulan bebas, seks bebas, dan pelecehan seksual merupakan tantangan serius bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda, termasuk pelajar. Fenomena pergaulan bebas di kalangan generasi muda dan pelajar mengindikasikan adanya penurunan kesadaran moral dan hukum dan harus segera diatasi. Faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan tentang hak asasi manusia, terbatasnya pendidikan seks, dan tidak memadainya peran orang tua dan masyarakat dalam membimbing generasi muda berkontribusi pada meningkatnya pelanggaran norma sosial dan hak asasi manusia. Pergaulan bebas seringkali mengarah pada perilaku seksual bebas dan pelecehan seksual, yang mempunyai dampak negatif yang signifikan secara psikologis, sosial, dan akademik terhadap generasi muda. Selain itu, peran media sosial sebagai platform yang memberikan kemudahan akses terhadap informasi yang tidak terkendali juga memberikan tantangan terhadap upaya perlindungan hak asasi manusia. Situasi ini kemungkinan akan bertambah buruk akibat

penyebaran informasi tidak valid dan berita palsu, serta meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap media sosial. Untuk mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sendiri. Pendidikan komprehensif tentang seksualitas dan nilai-nilai moral harus diberikan sejak dini di sekolah dan di rumah. Sebagai pemimpin pendidikan moral anak, orang tua harus lebih berperan aktif dalam membantu anak memahami akibat dari pergaulan bebas dan pentingnya melindungi hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan secara umum ya. Upaya untuk meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia di masa depan, terutama di kalangan generasi muda, memerlukan peningkatan kesadaran, pendidikan yang lebih baik, dan partisipasi aktif dari berbagai aktor untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan menghormati hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, pelajar mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi hak asasi manusia dan diharapkan mampu mendorong perubahan serta mewujudkan masyarakat beradab yang adil dan makmur.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini menghadirkan pendekatan baru yang menghasilkan temuan signifikan dan berpotensi membuka peluang inovasi serta aplikasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Belladonna,A,P &Anggraena.2019.Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (CIVIC KNOWLEDGE)Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.Vol.3,No.2
- Eliza,K,m.,dkk.2024.Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Journal Of Law And Nation*.Vol.3.No.2
- Harsono, A. (2019). *Race, Islam, and Power: Ethnic and Religious Violence in Indonesia*. Yale University Press
- Lestari,L,E&Arifin,R.2019.Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi hukum(JKH)*.Vol.5,No.2
- Nuraprilia, S & Dewi, D. A.2021.Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*.Vol.9,No.2
- Nurdin, N. & Athahira, A.U. (2022). *HAM, Gender dan Demokrasi*. Jatinongor : CV.Sketsa Media

Nuramelia, Sembiring, Harahap, Rambe, Sihaloho

Putra, R.K. (2024). *Hak Asasi Manusia*. Semarang : Universitas STEKOM
Setyawan,S,A.,dkk.2019. Pergaulan Bebas Dikal;angan Mahasiswa dalam
Tinjauan Kriminologi Dan Hukum. *Law Research Review Quarterly*.5(2)

Suparman, D. (2017). Pendidikan HAM untuk Masyarakat. Bandung: Pustaka Edukasi